EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN SUPIORI

Angelicka Sylsti Marionny Mamoribo
NPP. 33.1085
Program Studi Keuangan Publik
Email: angelickasylsti23@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Budi Margono., S.Pd, M.Si
Email: margonobudi07@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *This study is motivated by the significant gap between the large allocation of the Special Autonomy Fund (Dana Otsus) for education in Supiori Regency, reaching IDR 101.2 billion in 2025, and low educational outcomes, with an HDI of only 62.48. While previous studies have focused on provincial-level impacts or budget absorption, no research has systematically measured the effectiveness of this fund at the district level using Minimum Service Standards (SPM) indicators and the Value for Money framework.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the effectiveness of using the Special Autonomy Fund for basic education in Supiori Regency.* ***Method:*** *This qualitative descriptive research employed Mardiasmo's (2018) Value for Money framework. Data were collected through in-depth interviews with 8 purposively selected informants (Education Agency, BPKAD, school principals, teachers, parents), field observations, and documentation of SPM achievement data (2021-2024).* ***Result:*** *The findings indicate that: (1) economically, fund allocation has met the mandatory 30%, but high logistics costs in the archipelago cause unreasonable prices and mismatches with real needs; (2) efficiently, budget absorption is high (>90%), but output realization (school construction/rehabilitation, teacher training) is far below target; (3) effectively, access indicators (gross enrollment rate for elementary school) have improved, but quality indicators (net enrollment rate for elementary/junior high school, percentage of certified teachers) remain far below SPM targets.* ***Conclusion:*** *The ineffectiveness is caused by internal factors (low capacity of planning staff, weak monitoring) and external factors (archipelagic geography, limited electricity/internet, socio-cultural conditions). Without capacity building and outcome-oriented supervision, the fund functions more as a subsidy than as productive investment.*

Keywords: *Basic Education, Effectiveness, Minimum Service Standards, Special Autonomy Fund, Supiori Regency*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara besarnya alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) bidang pendidikan di Kabupaten Supiori yang mencapai Rp101,2 miliar pada tahun 2025 dengan rendahnya capaian indikator pendidikan (IPM 62,48). Penelitian terdahulu lebih fokus pada dampak di tingkat provinsi atau serapan anggaran, dan belum ada yang secara sistematis mengukur efektivitas dana Otsus di tingkat kabupaten menggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kerangka Value for Money. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus pendidikan dalam meningkatkan

pendidikan dasar di Kabupaten Supiori. **Metode:** Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan kerangka Value for Money dari Mardiasmo (2018). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 8 informan yang dipilih secara purposive (Dinas Pendidikan, BPKAD, kepala sekolah, guru, orang tua siswa), observasi lapangan, serta dokumentasi data capaian SPM periode 2021-2024. **Hasil:** Temuan menunjukkan bahwa: (1) secara ekonomi, alokasi dana telah memenuhi mandatori 30%, namun biaya logistik di kepulauan menyebabkan harga tidak wajar dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan riil; (2) secara efisiensi, serapan anggaran tinggi (>90%), namun realisasi output (pembangunan/rehabilitasi sekolah, pelatihan guru) jauh di bawah target; (3) secara efektivitas, indikator akses (APK SD) membaik, tetapi indikator mutu (APM SD/SMP, persentase guru tersertifikasi) masih jauh di bawah target SPM. **Kesimpulan:** Ketidakefektifan disebabkan faktor internal (kapasitas staf perencanaan rendah, monitoring lemah) dan eksternal (geografis kepulauan, keterbatasan listrik/internet, kondisi sosial budaya). Tanpa peningkatan kapasitas aparatur dan pengawasan berorientasi hasil, dana Otsus cenderung berfungsi sebagai subsidi dibandingkan dengan investasi produktif.

Kata kunci: Efektivitas, Dana Otonomi Khusus, Kabupaten Supiori, Pendidikan Dasar, Standar Pelayanan Minimal

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka bernegara, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memenuhi hak dasar warga negaranya, termasuk hak atas pendidikan. Pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, dinyatakan bahwa salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat ini kemudian dipertegas dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (Pemerintah Indonesia, 1945). Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri guna meningkatkan pelayanan publik, termasuk di sektor pendidikan (Moenek & Suwanda, 2019; Suwanda et al., 2019). Namun, para pengamat kebijakan publik menyoroti adanya penguatan kendali pusat terhadap daerah. Sasmita (2025) dalam artikelnya mengungkapkan bahwa meskipun otonomi daerah telah berlangsung lebih dari dua dekade, kekuatan fiskal tetap terpusat di Jakarta, dan tanpa otonomi fiskal, otonomi politik dan administratif hanya sebatas fasad belaka. Brata (2025) juga mengkritisi bahwa pemangkasan transfer ke daerah dapat menjadi indikasi gejala arus balik desentralisasi.

Pada daerah dengan karakteristik khusus seperti Provinsi Papua, pemerintah memberikan kebijakan otonomi khusus (Otsus) sebagai instrumen afirmatif untuk mempercepat pemerataan pembangunan, termasuk pada sektor pendidikan (Huda, 2021; Djohan, 2019). Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Pemerintah Indonesia, 2021). Pasal 34 ayat (3) huruf e angka (2) huruf a menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 30% dari dana penerimaan khusus dialokasikan untuk bidang pendidikan. Selain itu, alokasi dana Otsus diubah menjadi 80% untuk kabupaten/kota dan 20% untuk provinsi (Administrator, 2025).

Kabupaten Supiori merupakan salah satu kabupaten penerima dana Otsus di Provinsi Papua. Berdasarkan data dari BPKAD Supiori, alokasi dana Otsus meningkat dari Rp43,4 miliar (2021) menjadi Rp101,2 miliar (2025) (Redaksi Merdeka, 2025). Namun demikian, peningkatan alokasi dana tersebut belum diikuti oleh capaian indikator pendidikan yang memadai. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Supiori (2025), sebanyak 43,36% penduduk Kabupaten Supiori tidak tamat Sekolah Dasar atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) SMP hanya mencapai 65% pada tahun 2024, jauh di bawah target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 95%. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan (*policy gap*) yang signifikan

antara *input* (anggaran besar) dan *outcome* (capaian SPM rendah). Permasalahan ini tidak dapat dipahami hanya dari aspek keuangan semata, tetapi juga perlu dianalisis dari sisi proses kebijakan, efisiensi penggunaan, dan dampak sosialnya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori efektivitas Mardiasmo (2018) yang merupakan bagian dari konsep *Value for Money* untuk menganalisis efektivitas penggunaan dana Otonomi Khusus pendidikan di Kabupaten Supiori.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian mengenai dana otonomi khusus telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada tingkat provinsi atau agregat nasional. Penelitian Ero Kemong (2023) dengan pendekatan kuantitatif menemukan bahwa dana Otsus tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat. Penelitian Noviana (2025) menunjukkan bahwa dana Otsus tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendidikan di Aceh. Penelitian Kharisma et al. (2020) dan Ariyanda & Arifyani (2020) menganalisis dampak dana Otsus terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua, namun masih bersifat makro. Penelitian kualitatif seperti yang dilakukan oleh Korain et al. (2019), Rahman & Hidayat (2022), dan Wenda (2023) lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan dan faktor penghambat di tingkat kabupaten, namun belum menggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolok ukur efektivitas secara sistematis. Penelitian Cahyaningsih & Fitrady (2019) serta Rumere et al. (2022) mengkaji desentralisasi asimetris namun masih pada level provinsi. Selain itu, penelitian Sari & Nurhaliza (2025) merekomendasikan skema *Performance-Based Intergovernmental Transfers* (PB-IGT) namun masih bersifat umum dan belum diuji pada konteks dana Otsus tingkat kabupaten.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat *research gap* berupa belum adanya penelitian yang secara spesifik menganalisis efektivitas penggunaan dana Otsus pendidikan di Kabupaten Supiori dengan menggunakan indikator SPM pendidikan dasar sebagai tolok ukur. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis teori *Value for Money* Mardiasmo (2018) yang mengintegrasikan tiga dimensi yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara simultan.

1.3 Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa dana Otonomi Khusus yang besar tidak hanya menjadi beban fiskal, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dasar masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Supiori. Secara akademis, penelitian ini penting karena menawarkan pendekatan evaluasi berbasis SPM dan *Value for Money* yang dapat menjadi model bagi penelitian serupa di daerah otonomi khusus lainnya. Secara empiris, penelitian ini penting untuk menjelaskan fenomena kesenjangan antara besarnya investasi daerah dengan rendahnya capaian indikator pelayanan publik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Supiori dalam merumuskan kebijakan pengelolaan dana Otsus yang lebih terukur, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan pendidikan dasar (Sinurat & Purba, 2017; Labolo, 2017).

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai penelitian terdahulu. Penelitian Ero Kemong (2023) menggunakan pendekatan kuantitatif dan menemukan bahwa dana Otsus tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Papua Barat. Penelitian Noviana (2025) menunjukkan bahwa dana Otsus tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendidikan di Aceh. Penelitian Kharisma et al. (2020) menemukan bahwa alokasi dana Otsus bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Papua. Penelitian Aninam et al. (2018) mengkaji pengaruh alokasi dana Otsus terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Penelitian Ginting (2023) serta Prabowo et al. (2021)

mengevaluasi peran dana Otsus dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Penelitian kualitatif oleh Korain et al. (2019) di Kota Sorong menemukan bahwa implementasi kebijakan dana Otsus bidang pendidikan masih menghadapi kendala SDM dan koordinasi. Penelitian Rahman & Hidayat (2022) di Kabupaten Jayawijaya menemukan bahwa efektivitas dana Otsus terhambat oleh rendahnya kapasitas aparatur dan lemahnya koordinasi vertikal. Penelitian Wenda (2023) melalui observasi partisipatif di distrik-distrik terpencil Papua menemukan faktor geografis dan budaya sebagai penghambat utama. Penelitian Kadam & Setiadi (2021) serta Alfasisromarakap et al. (2021) mengkaji pembangunan infrastruktur pendidikan di Papua Barat dan hambatan di Biak Numfor. Penelitian Junaedi & Suswanta (2021) menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana Otsus Papua. Penelitian Tryatmoko (2012) membahas politik kebijakan pengelolaan dana Otsus.

Penelitian Sari & Nurhaliza (2025) secara nasional menemukan bahwa anggaran pendidikan berpengaruh positif terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan merekomendasikan skema *Performance-Based Intergovernmental Transfers* (PB-IGT). Penelitian Litschig & Morrison (2013) secara internasional menunjukkan bahwa transfer antar pemerintah berdampak positif pada outcome pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Penelitian Vegas & Coffin (2015) menganalisis kapan belanja pendidikan benar-benar berdampak. Penelitian Lewis (2023) mengkritisi undang-undang desentralisasi fiskal baru di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka *Value for Money* Mardiasmo (2018) yang mengintegrasikan analisis tiga dimensi (ekonomi, efisiensi, efektivitas) secara simultan pada tingkat kabupaten (Supiori) dengan indikator SPM pendidikan dasar sebagai tolok ukur, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung spesifik di wilayah kepulauan 3T.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada tiga aspek. *Pertama*, dari sisi objek, penelitian ini secara spesifik dilakukan pada Kabupaten Supiori yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan terpencil, kapasitas fiskal terbatas, dan penerima dana Otsus dengan kesenjangan input-outcome yang tinggi. *Kedua*, dari sisi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka *Value for Money* (Mardiasmo, 2018) yang mengintegrasikan tiga dimensi (ekonomi, efisiensi, efektivitas) dan menggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tolok ukur, yang belum pernah digunakan secara sistematis untuk menganalisis efektivitas dana Otsus pendidikan di tingkat kabupaten. *Ketiga*, dari sisi hasil, penelitian ini menemukan bahwa ketidakefektifan dana Otsus disebabkan oleh ketidaksinkronan antara faktor internal (kapasitas SDM aparatur, perencanaan yang tidak berbasis data, lemahnya monitoring) dan faktor eksternal (geografis kepulauan, biaya logistik tinggi, keterbatasan infrastruktur listrik dan internet, kondisi sosial budaya). Kebaruan ini sejalan dengan pandangan Agustinus (2023) dan Alken Demtu (2022) yang menekankan pentingnya manajemen dana otonomi khusus yang efektif, serta Bahruddin (2024) yang mengembangkan model evaluasi kebijakan SPM pendidikan.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus pendidikan dalam meningkatkan pendidikan dasar di Kabupaten Supiori.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis Teori Efektivitas (*Value for Money*) Mardiasmo (2018). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas berdasarkan kondisi empiris di lapangan (Sugiyono, 2020; Creswell & Creswell, 2023). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, pada tahun 2025-2026.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi secara triangulasi untuk memperoleh data yang valid dan kredibel. Wawancara mendalam dipilih karena penelitian ini membutuhkan pemahaman tentang pandangan dan pengalaman subjektif dari berbagai pihak yang memiliki posisi berbeda terhadap dana Otsus. Observasi dipilih untuk menangkap realitas langsung di lapangan yang tidak terungkap dalam wawancara atau dokumen, seperti kondisi infrastruktur sekolah dan proses pembelajaran. Dokumentasi digunakan sebagai alat verifikasi data objektif, seperti laporan realisasi anggaran dan data capaian SPM.

Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan alasan bahwa informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu: (a) terlibat langsung dalam pengelolaan, pelaksanaan, atau penerima manfaat dana Otsus pendidikan; (b) memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan dan implementasinya; (c) mewakili berbagai tingkatan (pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat). Jumlah informan sebanyak 8 orang, terdiri dari: Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP, Kepala BPKAD, Kepala Sub Bidang Pengelolaan SIKD, Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kepala Sekolah, Guru, dan Orang tua siswa. Data sekunder diperoleh dari BPS Kabupaten Supiori (2025), Dinas Pendidikan, BPKAD, dan dokumen peraturan perundang-undangan.

Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pemerintah daerah, pelaksana sekolah, dan orang tua), triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumentasi), serta triangulasi waktu (pengumpulan data pada periode berbeda). Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020): pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus pendidikan di Kabupaten Supiori menggunakan kerangka *Value for Money* Mardiasmo (2018) yang membagi analisis ke dalam tiga dimensi: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Data yang disajikan merupakan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi selama penelitian.

3.1 Ekonomi

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori (12 Januari 2026), alokasi Dana Otsus pendidikan tahun 2021-2025 secara nominal besar dan meningkat, namun kesesuaian dengan kebutuhan riil satuan pendidikan dasar masih belum optimal. Contohnya, pada tahun 2024 alokasi dana untuk pembangunan SMP baru di Pulau Meosbepondi sangat dibutuhkan untuk akses, tetapi beberapa SD di Distrik Supiori Utara yang bangunannya rusak parah justru belum mendapat alokasi rehabilitasi karena prioritas bergeser ke pemerataan akses. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun alokasi telah memenuhi target minimal 30% (Pemerintah Indonesia, 2021; Administrator, 2025), distribusinya belum berbasis skala prioritas kebutuhan riil. Temuan ini sejalan dengan Agustinus (2023) bahwa manajemen dana otonomi khusus sangat krusial.

Dari aspek kewajaran harga, wawancara dengan Kepala BPKAD (4 Januari 2026) mengungkapkan bahwa harga barang dan jasa di Kabupaten Supiori umumnya tidak wajar dibandingkan standar provinsi (Pergub Papua Nomor 48 Tahun 2022). Penyebab utamanya adalah biaya logistik tinggi karena wilayah kepulauan. Harga semen di Supiori bisa dua kali lipat harga di Jayapura. Kepala Sub Bidang Pengelolaan SIKD menambahkan bahwa penggunaan *e-katalog* belum maksimal karena infrastruktur internet tidak merata, sehingga sering terpaksa menggunakan penunjukan langsung dengan harga lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan kewajaran harga belum sesuai standar, disebabkan faktor geografis dan logistik. Hal ini memperkuat temuan Wenda (2023) bahwa faktor geografis menjadi penghambat utama efektivitas dana Otsu di daerah terpencil.

3.2 Efisiensi

Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori menunjukkan efisiensi yang belum optimal. Target kinerja 2024: pembangunan unit sekolah baru SMP tercapai 1 unit, namun SD target 2 unit realisasi 0 unit; rehabilitasi sekolah target 8 unit hanya terealisasi 3 unit (37,5%); pelatihan guru target 100 orang hanya terealisasi 60 orang (60%); serapan anggaran hanya 80,52% (umum) dan 83,47% (khusus), di bawah target 95%. Rasio input-output ini menunjukkan bahwa tingkat serapan anggaran tinggi tidak diikuti pencapaian output fisik sesuai target.

Ketepatan waktu pencairan juga bermasalah. Wawancara dengan Kepala BPKAD mengungkapkan bahwa pencairan Dana Otsus 2024 terlambat karena RAP perubahan belum selesai. Proyek rehab sekolah di Distrik Kepulauan Aruri yang seharusnya selesai Oktober baru dimulai November dan molor hingga Maret 2025 karena cuaca buruk. Keterlambatan juga berdampak pada pelatihan guru; jadwal bimtek yang seharusnya saat liburan sekolah terpaksa diundur ke bulan September, sehingga tingkat kehadiran guru menurun. Temuan ini sejalan dengan Rahman & Hidayat (2022) bahwa rendahnya kapasitas aparatur menyebabkan alokasi kurang tepat sasaran dan keterlambatan. Ketidakefisienan ini menunjukkan dana Otsus belum dikelola dengan prinsip *doing things right* (Mardiasmo, 2018; Suwanda et al., 2019).

3.3 Efektivitas

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan, tidak semua program dalam DPA terealisasi 100%. Program rehab sekolah tidak selesai tepat waktu, program pelatihan guru kurikulum merdeka hanya terealisasi 80% karena kendala partisipasi guru. Data capaian outcome SPM (Permendiknas No. 15 Tahun 2010; Pemerintah Indonesia, 2018; Triyono, 2016) menunjukkan: APK SD 2024 hanya 88% (target 95%), APM SD 69% (target 95%), APK SMP 83% (target 95%), APM SMP 65% (target 95%). Angka putus sekolah SD/SMP 0% (target maksimal 1%). Namun, persentase guru tersertifikasi sangat rendah: guru kelas SD tersertifikasi 36% dari target 43%, guru mapel SD 7% dari target 35%, guru mapel SMP 21% dari target 39%. Rasio guru-siswa SD 1:11,4 dan SMP 1:11,6 melampaui target SPM (maksimal 1:28 SD, 1:32 SMP).

Data ini menunjukkan bahwa dana Otsus cukup efektif untuk akses (rasio guru-siswa dan APK SD) tetapi belum efektif untuk mutu (APM, sertifikasi guru). Temuan ini sejalan dengan laporan Kementerian Dalam Negeri (2021) bahwa infrastruktur meningkat namun outcome stagnan. Penelitian Bahruddin (2024) dengan *Discrepancy Evaluation Model* juga menemukan kesenjangan target-realisasi SPM. Berdasarkan teori *Value for Money* Mardiasmo (2018), penggunaan Dana Otsus pendidikan di Kabupaten Supiori cukup efektif untuk akses namun belum efektif untuk mutu karena outcome belum mencapai target SPM secara menyeluruh.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa ketidakefektifan dana Otsus disebabkan oleh interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Faktor penghambat internal utama adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam menyusun perencanaan berbasis data (Agustinus, 2023; Alken Demtu, 2022). Kepala Dinas Pendidikan menyatakan bahwa banyak staf tidak mampu menyusun perencanaan berbasis data, sehingga alokasi kurang tepat sasaran. Monitoring dan evaluasi lemah karena kekurangan tenaga pengawas sekolah; data Dinas Pendidikan menunjukkan hanya 3 dari 8 orang pengawas yang bersertifikat. Transparansi pengelolaan dana juga kurang; informasi anggaran tidak dipublikasikan secara luas (Junaedi & Suswanta, 2021). Faktor penghambat eksternal meliputi: kondisi geografis kepulauan yang menyebabkan biaya logistik tinggi dan keterlambatan pengiriman (Wenda, 2023); keterbatasan infrastruktur listrik dan internet yang belum merata (Kadam & Setiadi, 2021; Alfasisromarakap et al., 2021); perubahan kebijakan pusat (Inpres No. 1 Tahun 2025); serta kondisi sosial budaya masyarakat yang masih menganggap pendidikan tidak penting dan lebih memilih anak membantu melaut atau berkebun.

Faktor pendukung internal terbesar adalah komitmen politik kepala daerah melalui program sekolah gratis hingga SMA dan beasiswa Rp7,9 miliar untuk 48 mahasiswa asli Papua. Regulasi Otsus memberikan kepastian alokasi 30% (Pemerintah Indonesia, 2021). Ketersediaan guru secara kuantitas juga mendukung (rasio guru-siswa melampaui standar). Faktor pendukung eksternal meliputi pembangunan 43 unit BTS 4G oleh BAKTI Kementerian Komdigi yang menjangkau 38 kampung, sehingga seluruh sekolah terhubung internet; dukungan kepala adat; serta kemudahan akses logistik melalui kapal perintis (meskipun belum optimal). Temuan ini sejalan dengan Litschig & Morrison (2013) dan Vegas & Coffin (2015) bahwa efektivitas transfer dana sangat bergantung pada tata kelola dan faktor kontekstual lokal.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan tiga faktor penghambat utama yang perlu segera diatasi: (1) ketiadaan indikator kinerja yang jelas menyebabkan dana Otsus lebih berfungsi sebagai subsidi daripada investasi produktif; (2) pengawasan yang masih berfokus pada kepatuhan administratif belum mampu mencegah ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi (contoh: prioritas pembangunan SMP baru di Pulau Meosbepondi sementara rehab SD di Supiori Utara tertunda); (3) faktor geografis kepulauan dan keterbatasan infrastruktur listrik dan internet menghambat implementasi program pendidikan, terutama di daerah 3T. Selain itu, temuan menarik adalah bahwa meskipun rasio guru-siswa melampaui standar nasional (1:11), kualitas guru (sertifikasi) sangat rendah, menunjukkan bahwa kuantitas tidak menjamin kualitas. Program sekolah gratis berhasil meningkatkan akses, tetapi tidak serta-merta meningkatkan partisipasi murni (APM) karena faktor biaya transportasi dan kebutuhan ekonomi rumah tangga masih menjadi penghalang. Rekomendasi Sari & Nurhaliza (2025) mengenai *Performance-Based Intergovernmental Transfers* (PB-IGT) menjadi relevan untuk dipertimbangkan di Kabupaten Supiori, di mana transfer dana dikaitkan dengan capaian indikator kinerja SPM.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus pendidikan di Kabupaten Supiori belum optimal. Dari dimensi ekonomi, alokasi telah memenuhi mandatori 30% namun ketidaksesuaian dengan kebutuhan riil dan ketidakwajaran harga akibat biaya logistik menjadi

masalah. Dari dimensi efisiensi, serapan anggaran tinggi tetapi output fisik rendah dan keterlambatan pencairan menghambat program. Dari dimensi efektivitas, akses pendidikan cukup baik tetapi mutu (APM, sertifikasi guru) masih jauh dari target SPM. Faktor penghambat meliputi rendahnya kapasitas SDM aparatur, lemahnya monitoring, geografis kepulauan, keterbatasan listrik/internet, dan sosial budaya. Faktor pendukung meliputi komitmen politik kepala daerah, regulasi Otsus, ketersediaan guru secara kuantitas, dan pembangunan BTS 4G. Dengan demikian, dana Otsus cukup efektif untuk akses tetapi belum efektif untuk mutu. Peningkatan kapasitas aparatur, pengawasan berbasis outcome, perencanaan berbasis kebutuhan riil, dan percepatan infrastruktur listrik/internet menjadi keharusan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada Kabupaten Supiori periode 2021-2024, sehingga hasil belum dapat digeneralisasikan. Pendekatan kualitatif tidak mengukur hubungan kausal kuantitatif. Keterbatasan data historis dan keterbukaan dokumen internal juga menjadi kendala. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan *mixed methods* atau membandingkan beberapa kabupaten. Perlu juga penelitian lebih mendalam tentang efektivitas program pelatihan guru, pemanfaatan teknologi pembelajaran jarak jauh di daerah 3T, serta faktor sisi permintaan (kemiskinan rumah tangga, jarak sekolah, norma sosial).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan analisis efektivitas dana otonomi khusus pendidikan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* (seperti regresi data panel atau *difference-in-differences*) agar hubungan antara alokasi dana Otsus, kinerja keuangan daerah, dan outcome pendidikan (APM, APK, angka putus sekolah, IPM) dapat diukur secara lebih komprehensif dan kausal. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan efektivitas dana Otsus pada beberapa kabupaten/kota di Papua dengan karakteristik geografis berbeda (kepulauan vs daratan, daerah terpencil vs perkotaan) untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai tata kelola dana otonomi khusus di Indonesia serta mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat direplikasi. Penelitian lanjutan juga dapat memperdalam aspek teknis operasional pendidikan seperti: (a) efektivitas program pelatihan dan pendampingan guru pasca sertifikasi terhadap peningkatan kompetensi pedagogik; (b) pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat; (c) pemanfaatan teknologi pembelajaran jarak jauh (PJJ) di daerah 3T yang masih terbatas listrik dan internet; serta (d) faktor-faktor sisi permintaan (*demand-side*) seperti kemiskinan rumah tangga, jarak tempuh ke sekolah, biaya transportasi, dan norma sosial budaya yang mempengaruhi keputusan orang tua menyekolahkan anak. Penelitian evaluasi kebijakan dengan model *Discrepancy Evaluation Model* (DEM) yang dikembangkan Bahruddin (2024) juga dapat diterapkan untuk mengukur kesenjangan secara lebih sistematis antara target SPM dan realisasi di lapangan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Supiori, Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori, BPKAD Kabupaten Supiori, DPRK Kabupaten Supiori, serta seluruh informan yang telah membantu pelaksanaan penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Budi Margono., S.Pd., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan, dan masukan. Terima kasih juga disampaikan kepada alm. Papi dan Mami, Papa dan Mama tercinta yang senantiasa mendoakan dan mendukung, serta seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Administrator. (2025). Perubahan alokasi Dana Otonomi Khusus Papua tahun 2021. Papua.

Agustinus, J. (2023). Manajemen Dana Otonomi Khusus dalam Pembangunan Pendidikan di Papua. Jayapura.

Akbar, B. (2013). Manajemen Keuangan di Pemerintahan Daerah: Suatu Konsep dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Metro: Bumi Metro Jaya.

Alfasisromarakap, A., Ahman, A., Sunaryo, S., Achmad, A., Husen, H., & Astra, I. M. (2021). Hambatan dan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua di era Otonomi Khusus Papua. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 4(1), 141–153. https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i1.1870

Alken Demtu, S. (2022). Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan di Papua. Jayapura.

Aninam, J., Maryunani, & Susilo. (2018). The effect of fund allocation of special autonomy of economical growth in West Papua Province. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 5(77), 156–161. https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-05.18

Anugrah, W., dkk. (2025). Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Tantangan Pemerataannya. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik, 12(1), 45–58.

Ariyanda, T., & Arifyani, D. (2020). Special Autonomy Law and education attainment in West Papua: A quasi-experiment analysis. Jambura Equilibrium Journal, 2(2), 95–108. https://doi.org/10.37479/jej.v2i2.6930

Badan Pusat Statistik Kabupaten Supiori. (2025). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Supiori 2025. Supiori: BPS Kabupaten Supiori.

Bahruddin. (2024). Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dengan Pendekatan Discrepancy Evaluation Model. Disertasi. Jakarta.

Brata, A. G. (2025). Kapasitas Fiskal Daerah dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Cahyaningsih, A., & Fitrady, A. (2019). The impact of asymmetric fiscal decentralization on education and health outcomes: Evidence from Papua Province, Indonesia. Economics & Sociology, 12(2), 48–63. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-2/3

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Daud, R. (2025). Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2019–2024. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Djohan, D. (2019). Sentralisasi dan Desentralisasi Harus Seiring Sejalan. Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Ero Kemong, M. A. (2023). Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 8(2), 112–126.

Fatmasari, E. P., & Rifada, L. (2023). Otonomi Khusus sebagai Bentuk Desentralisasi Asimetris di Aceh dan Papua. Jurnal Konstitusi dan Pemerintahan Daerah, 15(1), 67–81.

Ginting, A. M. (2023). The role of the special autonomy fund to improve the public service in the Papua Province. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 14(1).

https://www.researchgate.net/publication/405493098_THE_ROLE_OF_THE_SPECIAL_AUTONOMY_FUND_TO_IMPROVE_THE_PUBLIC_SERVICE_IN_THE_PAPUA_PROVINCE

Huda, N. (2021). Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus. Yogyakarta: UII Press.

Junaedi, A., & Suswanta. (2021). Analisis akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua. Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram, 7(2), 183–199. https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v7i2.209

Kadam, A., & Setiadi, R. (2021). Pengaruh kebijakan Otonomi Khusus Papua terhadap pembangunan prasarana pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 17(2), 183–191. https://doi.org/10.14710/pwk.v17i2.33350

Kementerian Dalam Negeri. (2021). Laporan Evaluasi Dana Otonomi Khusus Papua. Jakarta: Kemendagri.

Kharisma, V. D., Samputra, P. L., & Muntaha, P. Z. (2020). Analisis dampak kebijakan alokasi Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. Journal Publicuho, 3(1), 1–20. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11392

Korain, F., Kaunang, M., & Egetan, M. (2019). Implementasi kebijakan Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Jurnal Administrasi Publik, 5(86), 94–109. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/27635

Labolo, M. (2017). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2014). Pokok-Pokok Persoalan di Papua. Jakarta: Lemhannas RI.

Lewis, B. D. (2023). Indonesia's new fiscal decentralisation law: A critical assessment. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 59(1), 1–28. https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838

Litschig, S., & Morrison, K. M. (2013). The impact of intergovernmental transfers on education outcomes and poverty reduction. American Economic Journal: Applied Economics, 5(4), 206–240. https://doi.org/10.1257/app.5.4.206

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.

Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Noviana, R. S. (2025). Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Tingkat Pendidikan di Aceh. Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah, 10(1), 23–35.

Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Prabowo, P. A., Supriyono, B., Noor, I., & Muluk, M. K. (2021). Special autonomy policy evaluation to improve community welfare in Papua Province, Indonesia. International Journal of Excellence in Government, 2(1), 24–40. https://doi.org/10.1108/IJEG-06-2019-0011

Rahman, & Hidayat. (2022). Efektivitas Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Jayawijaya. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, 6(2), 101–118.

Redaksi Merdeka. (2025). Supiori Menjadi Daerah Pertama yang Menerima Transfer Dana Otsus Tahap I Tahun 2025. Merdeka.com.

Rumere, V., Sugiyanto, C., & Sulistyaningrum, E. (2022). The impact of special autonomy on education and health outcomes. JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan, 15(1). https://doi.org/10.15294/jejak.v15i1.32301

Sari, A., & Nurhaliza, N. (2025). Menakar efisiensi anggaran pendidikan di Indonesia: Perspektif rasio guru, krisis ekonomi, dan performance-based transfers sebagai manuver peningkatan efisiensi belanja pendidikan. Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 5(2). https://doi.org/10.55480/saluscultura.v5i2.428

Sasmita, R. P. (2025). Fiscal Decentralization or Recentralization? The Jakarta Post.

Sinurat, M., & Purba, H. M. (2017). Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Medan: Pustaka Rahmat.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Suherman, I. (2024). Teori dan Praktik Otonomi Daerah di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Suwanda, D., Ali Junjunan, B., Affandi, A., & Rusliati, E. (2019). Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Triyono, A. (2016). Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Indonesia. Jurnal Kebijakan Pendidikan, 5(1), 34–47.

Tryatmoko, M. W. (2012). Politik kebijakan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua. Jurnal Penelitian Politik, 9(1). https://ejournal.brin.go.id/jpp/article/view/10943

Vegas, E., & Coffin, C. (2015). When education expenditure matters: An empirical analysis of recent international data. Comparative Education Review, 59(2), 289–304. https://doi.org/10.1086/680324

Wenda. (2023). Efektivitas Dana Otonomi Khusus di Daerah Terpencil Papua: Studi tentang Faktor Geografis dan Budaya. Jurnal Pembangunan Wilayah Papua, 9(2), 77–91.

Wijaya, H. (2004). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: RajaGrafindo Persada.